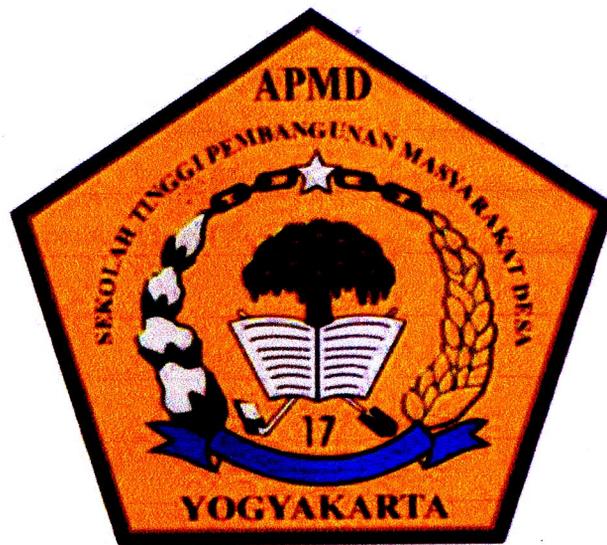


SKRIPSI

**KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS**

**(Penelitian di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun oleh :

MONIKA

18520204

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



**KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTITIS DI KALURAHAN
PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

Disusun Oleh :

MONIKA

18520204



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Juli 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. **Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si**
Ketua/Pembimbing



2. **Drs. Sumarjono, M.Si**
Penguji Samping I



3. **Dra. Safitri Endah Wanarti, M.Si**
Penguji Samping II



Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Monika

Nomor Mahasiswa : 18520204

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS”** di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya sendiri yang disusun untuk memenuhi persyaratan yang wajib di selesaikan untuk memperoleh Serjana (S1) Program studi Ilmu Pemerintahan di sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa AMPD” Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang saya dapatkan di lokasi penelitian yang saya cantumkan dalam penulisan ini dan sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, Dengan demikian jika dikemudian hari di temukan adanya kesamaan/plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 juli 2022



MOTO

“ Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok,
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.

Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.

(Matius 6:34)

“ Orang malas tidak akan menangkap buruknya, Tetapi orang rajin akan
Memperoleh harta yang berharga .“

(Amsal 12:27)

“ Nothing is permanent in this

Wicked world not even

Our troubles .“

(Charlie Chaplin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi rahmat, pertolongan dan anugrah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa terimakasih, karya ilmiah ini penulis ingin mempersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, kerana berkat rahmat kebaikan-nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orangtua saya, Bapak dan Ibu saya , karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa Bapak Dan Ibu. Dan yang selalu memberikan dukungan doa, moril serta moral untuk saya dalam segala proses kehidupan yang saya lalui, termasuk dalam proses pendidikan saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir.
3. Saudari-saudara saya terkasih, Siska Sriandani, Seselia Randa, Benedikta Bulle, Teresia Pitri, Fransiskus Seno, yang selalu memberi semangat dan doa.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Drs. Tryanto Purnomo Raharjo, BE.,M.Si yang senantiasa membantu dan penuh kesabaran serta membimbing saya dalam mengerjakan Skripsi saya.
5. Saya ingin mengucapkan terimakasih karena telah begitu baik dan simpatik , saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu, dan sekarang saya

memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, kepada Patrick Adtya Pratama Sinom S.Pd thanks for you .

6. Seorang sahabat yang berhati emas sulit ditemukan, kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya, kamu menjadi salah satu orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini saudari Feirerita salam hangat buatmu .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan peyertaannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan dalam mengkaji serta keterbatasan kemampuan penulis dalam mendeskripsikan hasil yang didapatkan. Namun skripsi ini merupakan hasil dari usaha dan upaya penulis. Tidak sedikit masalah dan hambatan yang dialami penulis dalam menyusun skripsi ini. Tapi dengan usaha dan semangat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan pada;

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Tryanto Purnomo Raharjo , BE.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan

support, sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat-nasehat yang sangat mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs, Jaka Triwidaryanta, M.Si. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh studi di STPMD “APMD”.
5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada kami dengan sepenuh hati dalam masa kuliah.
6. Pemerintah Kalurahan Parangtritis yang dengan baik hati memberikan izin, bantuan dan dukungan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kalurahan Parangtritis.
7. Masyarakat Kalurahan Parangtritis yang telah memberikan ruang, tempat, waktu bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu saya dalam pengumpulan data.
8. Orang tua peneliti Bapak Supianus dan Ibu Ernawati, yang selalu memberikan dukungan doa, dukungan moral, dan finansial kepada peneliti

9. Semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Penulis

Monika

18520204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	viv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Literatur Review	9
G. Kerangka Konseptual	14
1. Kolaborasi.....	14
2. Pemerintah.....	17
3. Masyarakat	19
4. Pariwisata	22
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Lokasi Penelitian	25
3. Informan	25
4. Teknik Pengumpulan Data	27
I. Teknik Analisis Data.....	30

BAB II PROFIL KALURAHAN PARANGTRITIS	35
A. Sejarah Desa	35
B. Keadaan Geografis.....	37
1. Keadaan Wilayah.....	37
2. Batas Wilayah.....	37
3. Penggunaan Tanah	38
4. Keadaan Iklim Tanah dan Air.....	40
C. Keadaan Demografi	40
1. Jumlah Penduduk	40
2. Komposisi Berdasarkan Usia	41
3. Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	42
4. Komposisi Menurut Agama	45
D. Keadaan Ekonomi.....	45
1. Mata Pencaharian Penduduk	45
E. Sosial.....	47
F. Profil Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat	48
1. Sejarah Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat ...	48
2. Tahapan-Tahapan Kolaborasi Pemenrintah dan Masyaratkat.....	50
3. Kendala yang Dihadapi Dalam Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis	51
 BAB III ANALISIS KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS DI KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KLETEK, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	 52
A. Analisis Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Oleh Pemerintah Parangtritis	54
1. Terdapat Partisipasi Para Pemangku	

Kepentingan.....	56
2. Terdapat Kondisi Dimana Ada Kesetaraan	60
3. Terdapat Aktor-Aktor Yang Kompeten	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka.....	71
Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	27
Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan Tanah/Lahan	39
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kalurahan Parangtritis Menurut jenis Kelamin	41
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 5. Komposisi Deskripsi Penduduk Menurut Agama.....	45
Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk.....	46

INTISARI

Pariwisata pada hakekatnya memiliki keunikan, kekhasan, dan orisinalitas yang menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. Adapun, peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik. Pantai Parangtritis merupakan salah satu pantai yang memiliki geografis berupa pegunungan dan pesisir pantai yang kaya akan objek wisata dan budaya, sehingga dapat menarik banyak minat wisatawan untuk berkunjung. Berlandaskan dengan latar belakang tersebut, peneliti kemudian merumuskan permasalahan penelitian dalam “bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis”. Bahwasanya, penertiban pariwisata pantai Parangtritis merupakan suatu bentuk melestarikan alam, budaya, dan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, skripsi ini berjudul “Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, guna menemukan makna dari penemuan di lapangan. Adapun, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta, analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman. Fokus penelitian berdasar pada teori Ansel DKK yang melihat kolaborasi pemerintah terbagi menjadi tiga proses yaitu Terdapat Partisipasi Para Pemangku Kepentingan, Terdapat Dimana Ada Kondisi Kesetaraan Kekuasaan, dan Terdapat Aktor-Aktor Yang Kompeten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi dalam kolaborasi peneriban pariwisata masih kurang terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara semua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata. Tindakan kolaborasi dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis dalam memfasilitasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwistaan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi penertiban pariwisata pantai Parangtritis sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwistaan namun hal ini belum signifikan karena kondisi pantai Parangtritis belum berkembang dengan baik walaupun demikian tanggapan kedua pihak yang bekerjasama sudah cukup baik meski masih ada tujuan yang belum dicapai. Kesimpulan, keberhasilan penertiban pariwisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat setempat, kelompok masyarakat, meskipun masih ada beberapa yang belum signifikan. Skripsi ini pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pengelolaan, Pariwisata

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dan dengan menikmati pemandangan yang luar biasa disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Kodhyat (1998), pariwisata adalah sebagai perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok atau pun usaha. Dimana orang yang melakukan perjalanan wisata ini memiliki kepentingan untuk keseimbangan mental, misalnya mengurangi stress, menghibur diri dan refreshing.

Keputusan orang untuk melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan manusia untuk menikmati pemandangan yang ada di objek wisata, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (trend) baru yang menarik diteliti Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016). *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon

keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan (Sambodo, 2016).

Ansell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfirmasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam penertiban pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik, benar dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas,

keanekaragaman, dan 3 kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. Inskeep (dalam Zaenuri; 2016).

Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa, dan menawarkan berbagai objek wisata baik itu wisata alam, budaya dan wisata buatan. Banyaknya objek wisata yang ada di Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020 wisman mencapai 277.456 pengunjung.

Parangtritis merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi wisata yang dimilikinya. Daerah yang dikenal sebagai pantai selatan ini memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki kekayaan objek budaya dan objek wisata. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah satu objek yang sangat diminati oleh para wisatawan adalah pantai Parangtritis karena keindahan pasir hitam yang terhampar luas dan air laut yang jernih membuat pemandangan di Pantai ini menjadi sangat menakjubkan.

Salah satu objek wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pantai Parangtritis, dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis tidak hanya pemerintah kabupaten sendiri yang melakukan tetapi pihak-pihak lain juga ikut

ambil bagian, yang dibantu masyarakat lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam penertiban pariwisata. Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok mengunjungi suatu tempat untuk rekreasi dimana terjadi interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk yang dapat memungkinkan timbulnya permasalahan atau konflik, salah satu contoh. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan yang terjadi antara wisatawan dengan penduduk maka diperlukannya instrument dari pemerintah setempat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka fungsi penertiban ini sangatlah penting.

Pantai Parangtritis merupakan pantai berpasir hitam yang sangat terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keindahan yang dimiliki pantai Parangtritis membuatnya terkenal di mancanegara. Keindahan pantai Parangtritis tidak diragukan lagi hamparan pasir hitam yang luas dan airnya yang jernih membuat nyaman wisatawan. Para wisatawan dapat menghabiskan waktunya untuk menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam, dan menghabiskan waktu liburnya dengan berenang, menyelam, atau hanya sekedar menikmati segarnya angin yang berhembus bersama keluarga.

Objek Pariwisata Pantai Parangtritis terletak di kecamatan Ketek kabupaten Bantul yang terletak diantara 7°58'33'' LS sampai dengan 8°2'26''LS dan diantara 110°25'15 BT sampai dengan 110°28'15'. Fenomena potensi pantai Parangtritis adalah salah satu obyek wisata pantai yang paling

banyak menyita perhatian wisatawan, tidak hanya sebagai tujuan wisata alamnya saja melainkan juga menjadi tujuan wisata religi dan budaya.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dapat di ketahui bahwa dalam mengelola dan penertiban pariwisata pantai parangtritis, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Dasar dari kolaborasi antara kedua pihak adalah SK Kepala Dinas Pariwisata yang mengakui bahwa pengelolaan pariwisata pantai parangtritis terjadi kolaborasi karena adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan objek wisata tersebut. Namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.

Objek wisata pantai Parangtritis yang sudah mendunia memiliki potensi yang sangat besar. Pantai parangtritis menawarkan hal seperti pantai pasir hitam dan pemandangan alam bawah laut. Namun dalam pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah kabupaten sebagai pengelola belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan sektor pariwisata pantai parangtritis. Karena untuk mengembangkan pantai parangtritis dibutuhkan sumber daya yang memadai.

Penertiban pariwisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang penertiban pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu didalam kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi, sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa memberikan manfaat. Dan ada beberapa kelompok yang ikut berpartisipasi selain Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lokal yang berperan dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis tetapi ada juga kelompok lainnya seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, Pokdarwis (pembinaan kelompok sadar wisata), dan kelompok masyarakat lokal yang ikut berkolaborasi yaitu Pokja Pokdarwis, Jaga Satru, SOSDL (*Save Our Sand Dunes Lives*)

Berdasarkan paparan di atas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul” dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi

mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola pariwisata di pantai Parangtritis

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis yaitu:

1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan
2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan
3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan
2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan
3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui bagaimana dinamika kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis”

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan khususnya di bidang Pemerintah Desa Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Menambah wawasan mengenai studi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata

2. Secara Praktik

a. Pemerintah,

Penelitian ini diharapkan Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan kesadaran warga tentang penertiban pariwisata yang baik.

b. Masyarakat,

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pariwisata dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih lanjut.

c. Akademisi.

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Literatur Review

Judul : Collaboratif Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba (2019), Ditulis Oleh Andi Hariadi, Universitas: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar . Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Definisi collaborative governance adalah suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik. Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas collaborative governance hingga Emerson, Nabatchi dan Balogh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama". Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual, sebuah tata kelola pemerintahan, yang dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor diluar pemerintah (baik masyarakat, komunitas,

NGOs, dan private sector) didalam proses pengambilan keputusan secara formal dan non formal yang berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelolah program dan sumber daya secara bersama. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengangkat Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penertiban Pariwisata. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata.

Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Program Persediaan Air Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMASI) Di Desa Obai Kecamatan Kutai Timur Kabupaten Alor (2020) , Mohamad Jihad Ayatullah Bay, Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelolah Program PAMSIMAS dalam bentuk Co- determination berjalan efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi dan pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang selanjutnya melakukan pelatihan untuk menemukan solusi dan mengatasi masalah yang timbul secara keseluruhan terkait pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelolah Program PAMSIMAS dalam bentuk Co-financing berupa pembiayaan belum berjalan secara efektif disebabkan tidak adanya biaya dari pemerintah setempat. dan pembayaran juga belum efektif, disebabkan oleh faktor pendapatan yang masih rendah, serta kondisi politik Desa Ombay yang

belum stabil. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelolah Program PAMSIMAS dalam bentuk Co-production berjalan secara efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan adanya komitmen waktu dalam pelaksanaan program secara bersama yaitu antara pemerintah dan masyarakat, serta dalam tahap pengerjaannya program ditentukan secara terbuka oleh masyarakat didukung dari pemerintah setempat. Di dalam jurnal penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada pun persamaannya yaitu pada metode penelitian, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, kemudian jurnal penelitian ini pun menjadikan kepemimpinan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sebagai objek penelitiannya. Ada pun perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan salah satunya pada lokasi penelitian.

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Edukasi Di Desa Kemari Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (2020), Dwi Alamsyah, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar . Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti berfokus pada tahapan-tahapan proses collaborative governance dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari bab pembahasan sebagai berikut: Face to face dalam proses collaborative governance melibatkan pemerintah, masyarakat sekitar objek wisata dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah untuk membahas perencanaan

pengembangan wisata edukasi. Trust building atau membangun kepercayaan yang dilakukan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan melakukan promosi. Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi telah melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban. Akan tetapi dalam kelengkapan sarana dan prasarana masih belum memadai dan SDM yang kurang. Shared understanding untuk menilai sejauh mana proses dari kolaborasi yang dihasilkan yaitu terdapat forum sosialisasi maupun pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, menyediakan pamong wisata untuk mengontrol keamanan wisata. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada fokus penelitiannya dan juga dalam salah satu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini salah satu teknik pengumpulan datanya menggunakan tinjauan pustaka, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan teknik pengumpulan data tersebut.

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (2019), Studi Kasus Pada Kegiatan Rakyat Simpedes , Kabupaten Pati. Zahratul Aeni¹ dan Retno Sunu Astuti. Penelitian dalam studi kasus ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dalam hal pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati yakni kurang aktifnya inisiasi dari pemerintah daerah sendiri dalam menggali potensi wisata di Kabupaten Pati. Di samping itu, permasalahan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati terletak pada kurang jelasnya sasaran dan target terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati.

Sasaran menggambarkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan atau individu. Sasaran berguna untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana harus melihat jauh ke depan, memprediksi perubahan, mengestimasi dampak dari perubahan, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Dengan kerja terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi dampak. Selain itu, manajer dapat juga mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menyebabkan inefisiensi di perusahaan. Manfaat terakhir dari sasaran adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi berikutnya, yang merupakan proses pengendalian dan evaluasi. Proses evaluasi adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan. Tanpa rencana, manajer tidak dapat menilai kinerja perusahaan. Kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta diharapkan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan yang terpenting membawa manfaat bagi masyarakat lokal karena banyak kesepakatan antara pemerintah dan swasta yang memberikan dampak kurang positif bagi masyarakat luas. Baik pemerintah dan swasta terkadang kurang transparan dalam pengelolaan objek kerjasama. Oleh karena itu, dilakukan analisis mengenai tujuan yang harus dicapai oleh para stakeholder WBL berdasarkan 8 elemen yang harus hadir pada tujuan untuk membangun sektor pariwisata, yaitu: a) Posisi pasar, pangsa pasar yang bisa dikuasai oleh pariwisata dengan melihat berapa banyak pengunjung yang dapat dikuasai atau segmen pasar. b) Produktivitas, dengan menghitung target kunjungan dengan realisasi kunjungan pariwisata. c) Sumber daya fisik,

dengan memperhatikan teknologi yang digunakan dan sumber daya yang diperlukan terkait kualitas layanan. d) Keuntungan, pencapaian tujuan yang dihitung melalui banyaknya manfaat yang diterima dan ketersediaan modal untuk renovasi infrastruktur. e) Inovasi, yaitu reformasi dilaksanakan dengan merilis sebuah baru permainan atau teknologi yang lebih canggih. f) Prestasi dan pengembangan manajer, berkaitan dengan kualitas manajemen untuk manajer pengembangan. g) Prestasi dan sikap karyawan, dengan menetapkan tujuan yang terkait faktor-faktor dalam mencapai efektivitas kerja karyawan. Tanggung jawab publik, untuk berurusan dengan turbulensi pada pariwisata dilakukan oleh karyawan dalam bentuk pemogokan atau protes, hukum, pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Adapun analisis yang lebih rinci terkait dengan 8 elemen yang harus dipenuhi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada pun perbedaan jurnal penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan ditemukan beberapa perbedaan, diantaranya dalam teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan juga fokus penelitian.

G. Kerangka Konseptual

1. Kolaborasi

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau *collaboration* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas Frans & Bursuck (dalam Afdal 2015) mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para professional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini

menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Idol & Baran (dalam Afdal 2015) yang menyatakan bahwa in collaborative, planning and implementing are joint effort. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama.

Sink (dalam Zaenuri 2016) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai proses diaman oragnisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat dari Fosler (dalam Zaenuri 2016) menjelaskan secara lebih spesifik mengenai kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, 9 termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan eligment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama. Dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpasitipasi dalam urusan yang disepakati bersama. Dari konsep kolaboratif yang meungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar governance karena sudah diyakini adanya visi bersama maka akan semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor

non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun begitu masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Dwiyanto, 2010).

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal sekaligus bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk

saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang karena memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak. (Dwiyanto, 2010)

2. Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha. 1997;6). Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu. 2012;7).

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Untuk memahami pengertian pemerintahan, kita dapat memaknai dari asal katanya. Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S Poerwadarmita perintah diartikan sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk

melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:35).

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai 14 seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakah. Dalam bahasa Arab sendiri masyarakat disebut dengan sebutan mujtama`, yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al `Arab mengandung arti (1) pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan, (2) kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda. Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu. dan saling bekerjasama. Jadi dari kata musyarakah dan mujtama` sudah dapat ditarik definisi ataupun pengertian bahwa masyarakat

adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Begitu pula menurut pendapat para ahli dibidannya bahwa pengertian atau definisi masyarakat pada dasarnya adalah sama yaitu sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Dari pengertian itu maka dapat kita bayangkan bagaimana anatomi dari masyarakat yang berbeda-beda. Dapat dijumpai misalnya ada; masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, masyarakat Jawa, masyarakat Islam, masyarakat pendidikan, masyarakat politik dan sebagainya. Semua jenis masyarakat tersebut pastilah terdiri dari unsur-unsur yang berbeda-beda tetapi mereka menyatu dalam satu tatanan sebagai wujud dari kehendak bersama. Karena adanya dua atau beberapa kutub; yakni berasal dari unsur yang berbeda-beda tetapi bermaksud menyatu dalam satu tatanan, maka dari kutub pertama ke kutub ke dua ada proses yang membutuhkan waktu yang panjang. Masyarakat Indonesia misalnya, sudahkah mereka menyatu dalam kesatuan ? ternyata setengah abad merdeka belum cukup waktu untuk menyatukan sebuah masyarakat Indonesia meski sudah diwadahi dengan istilah Bhineka Tunggal Ika. Abad pertama kemerdekaan Indonesia nampaknya masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan masih merupakan nation in making, masih dalam proses menjadi. Hambatan dari proses itu adalah adanya rujukan dan kepentingan yang berbeda-beda. Demikian juga masyarakat Islam Indonesia, masyarakat OKI dan sebagainya.

Ralp Linton dalam bukunya “The Study of Man” hal 91 mengemukakan bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok Manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, Sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas.

Dari pengertian masyarakat yang disampaikan oleh pakar diatas, maka dapat disimpulkan Pengertian Masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Jadi Masyarakat adalah bentuk pengelompokan manusia yang menunjukkan aktivitas-aktivitas bersama yang tampak dalam interaksi diantara anggota-anggota kelompok tersebut, dimana kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok hanya dapat dipenuhi dengan jalan berinteraksi dengan individu-individu. Dalam ilmu sosiologi kita kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota- anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggota nya.

Unsur-unsur suatu masyarakat

1. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
2. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
3. adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Ciri-ciri dari suatu Masyarakat, diantaranya ialah

1. Merupakan pengelompokkan individu.
2. Adanya interaksi antara individu-individu anggota masyarakat.
3. Adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
4. Individu-individu sebagai satu kesatuan mendukung, mengembangkan, dan meneruskan kebudayaan.

4. Pariwisata

Methiesson dan Waill (dalam Nawawi, 2013) pariwisata merupakan pergerakan manusia yang sifatnya hanya sementara ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilakukan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Baiquni (dalam Nawawi, 2013) pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan

terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson (dalam Zaenuri 2016) pariwisata merupakan industri yang selalu “dihantui” oleh bencana dan krisis, bahkan bias dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya.

Pariwisata menurut pendapat dari Krapt dan Hunziker (dalam susilawati 2016) adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang diakibatkan perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang hanya sementara.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pariwisata. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya,

untuk itu penelitian dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2010:9) artinya adalah penelitian deskripsikan hanya berusaha mengungkapkan suatu fakta-fakta atau permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada dilokasi penelitian tanpa adanya hipotesa terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian metode ini kualitatif seperti yang di kemukakan oleh Creswell dalam metode Sugiyono (2017:3) bahwa metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara. Mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial kedalam tema. Dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah pembuatan laporan kedalam struktur yang fleksibel. Artinya penelitian secara kualitatif tertuju pada objek yang alamiah atau sesuai dengan temuan yang ada dilapangan selanjutnya temuan tersebut dikumpulkan dan dipelajari untuk dijadikan data penunjang dalam penelitian yang diakhiri dengan pembuatan laporan kedalam struktur yang fleksibel.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu keadaan yang benar-benar terjadi/ fakta di lokasi penelitian. Dan setelah temuan fakta-fakta

dilapangan, peneliti akan memaparkan hasil dari temuan tersebut apa adanya dan menuangkannya didalam laporan yang terstruktur dan fleksibel.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan

Nyoman Khuta Prastowo (2012:199), yang mana obyek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya obyek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang menjadi obyek pada penelitian ini mengenai Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.

Sugiyono dalam Prastowo (2012:195), Secara lebih spesifik, subyek penelitian adalah informan. Informan adalah orang pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Pemilihan yang simpel pada penelitian, yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive*, teknik *Purposive* ini merupakan teknik penentuan informan yang didasari atas pertimbangan tertentu. Dengan teknik *Purposive* sebagai penentuan informan didasarkan

pada tujuan penelitian, yang menjadi sampel hanyalah sumber yang cukup relevan saja.

Dalam penelitian ini, informan berjumlah 9 orang (sembilan orang) subyek penelitian meliputi Pemerintah Desa Parangtritis dan kelompok masyarakat yang terkait yang berjumlah 7 (tujuh orang), diantaranya adalah (Dukuh Mancingan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Jaga Baya, Pokdarwis, Pokja Pokdarwis, Sekretaris Jaga Satru dan SOSDL) dan informan dari masyarakat berjumlah 2 orang (dua orang). Peneliti memilih informan dari Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat karena dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai informan penting karena mereka yang berperan penting dan besar dalam menentukan arah dari suatu kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan, sehingga peneliti ingin mengetahui kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis.

Tabel 1.1

Data Informan

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan
1	Elyas Saputra	42	Kasi kesejahteraan	Laki-Laki	S1
2	Nanang Andarwanto	33	Staf Jagabaya	Laki-Laki	S2
3	Handri Sarwoko	46	Dukuh Mancingan	Laki-Laki	S1
4	Tri Waldiyana	52	Ketua Pokdarwis	Laki-Laki	SMA
5	Asnan Rianto	27	Sekretaris Jaga Satru	Laki-Laki	SMA
6	Suryanta	58	Anggota Pokja Pokdarwis	Laki-Laki	SMA
7	Kamrihadi	54	Ketua SOSDL	Laki-Laki	SMA
8	Risman	43	Masyarakat	Laki-Laki	SMA
9	Bekti Sujianti	50	Masyarakat	Perempuan	SMP
Jumlah					9

Sumber : Data primer Tahun 2022

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain:

- a. Observasi

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2017:108), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan menurut Marsall, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mendasari semua ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk mengamati, mencatat, dan memaknai berbagai situasi dan kondisi serta gejala yang terjadi di lokasi penelitian tersebut.

b. *In-Depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Dalam penelitian kualitatif wawancara adalah bagian terpenting dalam proses pengambilan data karena berhadapan langsung dengan jawaban atas masalah yang hendak kita teliti. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017: 144) dengan menggunakan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan wawancara sebagai langkah pencarian data agar dapat mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan wawancara sebagai langkah pencarian data agar dapat mengetahui situasi yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam wawancara, penelitian menggunakan wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistimatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya lebih terarah pada satu tujuan. (Sugiyono, 2017:116).

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006:72) ciri khas dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang mendalam dengan langsung bertatap muka antara si pemberi pertanyaan dan si pemberi informasi dengan menggunakan panduan yang sudah ada dan dalam prosesnya peneliti lebih banyak mendengarkan si pemberi informasi tanpa terlalu terpaku pada pedoman wawancara. Untuk menunjang

proses penelitian maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu: Pemerintah Desa Parangtritis, Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis, dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:124). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, flem, dan lain-lain. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang termasuk dalam dokumen. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang termasuk dalam dokumen penunjang penelitian ini.

I. Teknik Analisis Data

Agar data dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validasi data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Pemerintah Desa Parangtritis selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

Setelah semua data terkumpul baik data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maka data- data yang telah dikumpulkan harus segera diolah secara sederhana dan sistematis dan dikelompokan urutan-urutan pembahasan. Tentunya agar dapat memaknai permasalahan secara lebih sederhana dan perlu dilakukan dengan menganalisis data.

Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2008 : 240) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles and Huberman (1984) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2017:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yang diungkapkan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 134), antara lain:

a. *Data Collection* (pengumpulan data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, dan wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan kegiatan (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti akan melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek tentang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang dicapai. Tujuan utama dari penelitian dalam kualitatif adalah pada temuan. Apa bila dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki

pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data yang merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan kedalaman wawasan yang tinggi.

c. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.

d. *Conclusion Drawing/Verification* (kesimpulan dan verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, maka akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang ditemukan data berikutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang diketemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merukan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru dan temuan baru yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru berupa deskripsi atau gambaran

suatu obyek sebelumnya yang masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Keabsahan data yang telah dianalisis dilakukan dengan cara triangulasi. yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Moleong, 1999 dalam Sugiyanto,dkk 2010,6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil observasi.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PARANGTRITIS

A. Sejarah Desa

Sejarah nama Parangtritis bisa dibilang cukup menarik. Konon, ada seorang pelarian dari Kerajaan Majapahit bernama Dipokusumo yang melakukan semedi dikawasan itu. Ketika sedang bersemedi, ia melihat air yang menetes (tumaritis) dari celah-celah batu karang (parang). Kemudian ia memberi nama daerah tersebut Parangtritis yang berarti air yang menetes dari batu. Pantai Parangtritis diyakini merupakan perwujudan dari kesatuan trimurti yang terdiri dari Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Pantai Parangtritis itu sendiri. Masyarakat setempat meyakini Pantai Parangtritis merupakan bagian dari daerah kekuasaan Ratu Selatan yang dikenal dengan nama Nyai Roro Kidul. Menurut mereka, Nyai Roro Kidul menyukai warna hijau. Oleh karena itu wisatawan yang mengunjungi Pantai Parangtritis disarankan untuk tidak memakai baju warna hijau. Selain sarat dengan kisah misteri Nyai Roro Kidul, pantai parangtritis juga dikisahkan sebai bertemunya Panembahan Senopati dengan Sunan Kalijaga sesaat setelah Panembahan Senopati selesai menjalani pertapaan. Selain terkenal sebagai tempat rekreasi, Parangtritis juga merupakan tempat keramat. Banyak pengunjung yang datang untuk labuhan dari keraton Yogyakarta.

Kalurahan Parangtritis awalnya merupakan dua wilayah yaitu Kalurahan Sono dan Kalurahan Grogol. Kalurahan Grogol terletak di bagian

timur Kalurahan Parangtritis, sedangkan Kalurahan Sono terletak di bagian barat Parangtritis. Lokasi kalurahan ini mempengaruhi ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi di masa lampau tumbuh lebih cepat di Kalurahan Grogol. Masyarakat Kalurahan Grogol memiliki lahan sawah yang cukup luas dan juga mempunyai pariwisata Pantai Parangtritis yang sudah berkembang sejak penjajahan Belanda, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pada tahun 1946 kedua kelurahan ini bergabung menjadi Kalurahan Parangtritis. Kalurahan Sono terpecah menjadi 6 dusun yaitu Dusun Duwuran, Dusun Kretek, Dusun Sono, Dusun Samiran, Dusun Bungkus dan Dusun Depok. Kalurahan Grogol terpecah menjadi 5 dusun yaitu Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, Grogol X dan Mancingan.

Perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi di Kalurahan Parangtritis mulai dilakukan pada tahun 1980. Jaringan jalan utama dan penghubung sebelumnya hanya berupa batu dan material tanah mulai diaspal. Pada tahun 1989 dibangun jembatan melintasi Sungai Opak yang menghubungkan antara Kalurahan Parangtritis dan Desa Donotirto. Jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Kretek. Hambatan dari sarana transportasi telah hilang, Kalurahan Parangtritis sudah dapat diakses dengan mudah. Sejak saat itu Kalurahan Parangtritis mulai berkembang sebagai daerah tujuan wisata. Tempat wisata yang mulai dikenal adalah Pantai Depok. Pantai Depok mulai diresmikan tahun 1998. Perkembangan ekonomi warga di sekitar Pantai Depok mulai meningkat. Dusun Depok mampu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan dusun yang lain.

B. Keadaan Geografis

Kalurahan Parangtritis merupakan desa yang terletak di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Parangtritis memiliki luas 11,87 km².

1. Keadaan Wilayah

Secara administratif Kalurahan Parangtritis terdiri dari 11 padukuhan.

11 padukuhan tersebut diantaranya:

1. Dusun Sono
2. Dusun Samiran
3. Dusun Bungkis
4. Dusun Depok
5. Dusun Duwuran
6. Dusun Grogol VII
7. Dusun Grogol VIII
8. Dusun Grogol IX
9. Dusun Grogol X
10. Dusun Mancingan
11. Dukuh Kretek

2. Batas Wilayah

Wilayah Kalurahan Parangtritis terletak di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Donotirto
2. Sebelah Selatan : Samodra Indonesia
3. Sebelah Barat : Desa Tirtohargo
4. Sebelah Timur : Kalurahan Seloharjo dan Kalurahan Girijati

3. Penggunaan Tanah

Luas wilayah Kalurahan Parangtritis memiliki luas 11,87 km² yang terdiri dari :

1. Tanah sawah
2. Tanah kering
3. Tanah basah (tambak , kebun desa, bangunan sekolah, dan pasar)
4. Tanah keperluan umum (lapangan olahraga, tanah rekreasi, jalur hijau, pemakaman)
5. Tanah hutan

Untuk melihat penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Luas Lahan Tanah Menurut Penggunaan Lahan/Tanah

NO	Jenis Penggunaan	Luas (Hektar)
1	Tanah sawah	167,80
2	Tanah kering	616,56
3	Tanah basah	16,00
4	Tanah keperluan umum	98,63
5	Tanah hutan	18,52
	Jumlah	917,51

Sumber : Data Monografi Desa Parangtritis 2022

Dari tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa luasan tanah kering memiliki prosentase tertinggi pada luasan lahan pertanian yang ada di Desa Parangtritis, yakni berada pada angka 67,2 % dari keseluruhan luas lahan, atau sebesar 616,56 Ha. Dan luas lahan tanah sawah menempati luas lahan terbesar kedua setelah lahan kering yaitu 167,80 Ha atau 18,29% dari keseluruhan jumlah luas lahan pertanian yang ada di Desa Parangtritis.

Kemudian sisanya terbagi pada luas tanah hutan, fasilitas umum serta luas tanah basah yakni dengan jumlah luas keseluruhan lahan 14,51% atau 133,15 Ha, yang terdiri dari luas tanah hutan sebesar 18,52 Ha, luas tanah basah sebesar 16,00 Ha dan luas fasilitas umum 98,63 Ha atau yang terdiri dari penggunaan sebagai kebun desa, fasilitas umum perkantoran, bangunan sekolah, pasar serta berbagai fasilitas umum lain yang termasuk pada kategori public facilities di Desa Parangtritis.

4. Keadaan Iklim Tanah dan Air

Wilayah desa parangtritis berada pada dataran rendah yaitu 15 meter diatas permukaan laut, sedangkan dengan kondisi iklimnya sama dengan daerah lainnya yaitu beriklim tropis dan dua musim, dan dengan suhu yang tercatat pada 28°C hingga suhu tertinggi pada 32°C dengan bentang wilayah 95% berupa areal tanah datar dan 5% berupa daerah berombak hingga berbukit.

C. Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu modal dasar dalam pembangunan yang nantinya dapat dibina, diarahkan, serta dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang menguntungkan guna peningkatan pembangunan desa disegala bidang, selain itu penduduk sebagai subyek dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Sesuai data yang diperoleh pada monografi Desa Parangtritis bahwa jumlah penduduk sebesar 7.857 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk laki-laki= 3.852
2. Jumlah penduduk perempuan = 4.005

Dari total penduduk tersebut , bila ditinjau dari jenis kelamin akan tampak seperti tabel berikut.

Tabel 2

Jumlah penduduk Desa Parangtritis Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	3.852
2	Perempuan	4.005
	Jumlah	7.857

Sember : Data Monografi Desa Parangtritis 2022

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki berjumlah 3.852 dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.005. Terdapat perbedaan antara perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dan yang berjenis kelamin laki-laki namun tidak begitu signifikan dan cukup berimbang. Namun cukup berdampak terutama bidang tenaga kerja pertanian yang dimana peran laki-laki begitu besar karena pekerjaan pertanian membutuhkan tenaga lebih, akan tetapi posisi perempuan tak kalah penting dengan ketelitiannya dalam mengerjakan segala sesuatu.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Keadaan penduduk berdasarkan pada kategori usia penduduk di Desa Parangtritis dikelompokkan berdasarkan dari beberapa golongan usia sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur (tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-15	1.816
2	15-65	5.361
3	>65	680
	Jumlah	7.857

Sumber : Data Monografi Desa Parangtritis 2022

Besaran jumlah penduduk di Desa Parangtritis tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3 yaitu berjumlah sebesar 7.857 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Parangtritis yang tergolong pada usia produktif yaitu antara umur 15-65 tahun mencapai 5.361 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Parangtritis. Dan pada usia yang tergolong non produktif dengan jumlah 2.496 jiwa .

3. Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kemajuan hidup seseorang maupun kemajuan suatu masyarakat, karena pendidikan memiliki imbas yang begitu besar terhadap tingkat perkembangan segala sesuatunya baik dari perkembangan individu hingga berdampak pada kolektif atau lingkungan. Tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menerima hal-hal yang bersifat inovatif, keterbukaan dalam berfikir serta memiliki wawasan luas memandang segala sesuatu berdasarkan nilai positif.

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang tergolong tinggi merupakan kelompok penduduk potensial menuju kemajuan hidup bermasyarakat dengan kemampuan berfikir yang lebih maju berdasarkan logika fikir yang dimiliki. Dan tingkat pendidikan mampu mempengaruhi segala bentuk ruang hidup dalam individu maupun masyarakat dengan maksud semakin tinggi tingkat pendidikan maka keadaan sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya manusianya akan berada pada posisi potensi berkembang menuju kearah kemajuan. Begitupun sebaliknya dengan tingkat pendidikan tergolong rendah maka dapat menjadi faktor penghambat kemajuan, karena pendidikan begitu berpengaruh pada kemajuan pola pikir seseorang. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Parangtritis digolongkan menjadi beberapa jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tk/Taman Kanak-kanak	427
2	SD	2.428
3	SMP	1.325
4	SMA/Sederajat	2.427
5	Akademi/D1-D3	224
6	Sarjana S1	658
7	Pascasarjana (S2 dan S3)	40
8	Pondok Pesantren	5
9	Pendidikan Keagamaan	2
10	Sekolah Luar Biasa	11
11	Tidak Lulus	45
12	Tidak Sekolah	258
	Jumlah	6.488

Sumber : Data Monografi Desa Parangtritis 2022

Penduduk di Desa Parangtritis memiliki pendidikan setingkat Akademi D1-D3, SI dan Pascasarjana (S2 dan S3) berjumlah 922 jiwa. Sedangkan jumlah pendidikan terbanyak didominasi pada tingkat SMA/Sederajat yaitu 2.427 jiwa dan disusul oleh penduduk pada tingkat pendidikan SMP sebesar 1.325 jiwa dari seluruh jumlah pada tingkat pendidikan di Desa Parangtritis. Dari hal tersebut penduduk Desa Parangtritis memiliki tingkat pendidikan yang tergolong cukup tinggi.

4. Komposisi Menurut Agama

Salah satu kebutuhan religius manusia yang selalu dibutuhkan salah satunya adalah agama. Komposisi Desa Parangtritis berdasarkan pemeluk agama dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5

Komposisi Deskripsi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.718
2	Kristen Protestan	121
3	Kristen Katolik	16
4	Hindu	1
5	Budha	1
	Jumlah	7.857

Sumber : Data Monografi Desa Parangtritis 2022

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Parangtritis beragama Islam,yaitu berjumlah 7.718 jiwa, agam Katolik berjumlah 16 jiwa, agama kristen 121 jiwa, agama Hindu berjumlah 1 jiwa dan yang terakhir agama Budha berjumlah 1 jiwa.

D. Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Desa Parangtritis guna menghidupi dirinya, keluarganya, maupun anggota lain

yang menjadi tanggungan hidupnya. Terdapat banyak struktur mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Desa Parangtritis baik usaha yang dilakukan secara sendiri dan usaha yang dilakukan sebagai jasa untuk orang lain. Struktur mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	521
2	Buruh Tani	1.733
3	Pegawai Negri Sipil	192
4	Tukang	389
5	TNI	52
6	Polri	50
7	Swasta	1.073
8	Wiraswasta/Pedagang	232
9	Buruh Tani	1.733
10	Pensiun	102
11	Peternak	59
12	Nelayan	175
13	Jasa	155
14	Pengrajin	18
15	Pekerja Seni	6
16	Lin-Lain	874
	Jumlah	7.857

Sumber : Data Monografi Desa Parangtritis Pada Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 6 sebagian besar penduduk Desa Parangtritis memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1.733 jiwa . Mengakibatkan Desa Parangtritis merupakan salah satu desa penghasil pangan. Penduduk desa biasanya membudidayakan bawang merah, padi, cabai, dan palawija. Namun dalam siklus tanam yang dimiliki oleh petani yaitu padi-bawang merah-cabai-bawang merah, terlihat jelas bahwa komoditas unggulan dari Desa Parangtritis adalah bawang merah dengan varietas crok kuning yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh penduduk setempat.

Jumlah tertinggi selanjutnya adalah sektor wirausaha yaitu sebanyak terdiri dari 1.678 jiwa. Sektor ini didukung dengan adanya sektor pariwisata yang dimiliki oleh Desa Parangtritis yang membuka jalur ekonomi tersendiri bagi penduduk desa. Namun, sektor wirausaha ini belum menyentuh pada hasil olahan pangan unggulan dari desa sehingga hasil pertanian dari petani hanya dipasarkan dalam kondisi mentah saja. Sementara itu, hasil jumlah terendah adalah Pekerja Seni yaitu 6 orang. Hal ini dikarenakan oleh menjadi seorang pekerja seni membutuhkan lisensi dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Selain itu, alasan kemauan atau motivasi untuk menjadi penerja seni tidak dimiliki semua orang, sehingga mata pencaharian pada sektor ini sangat jarang ditemui.

E. Sosial

Keadaan sosial masyarakat di Desa Parangtritis sejauh ini terlihat baik antara warga masyarakat satu dengan yang lainnya. Dimana kehidupan sosial

ini terwujud dari berbagai kegiatan masyarakat yang tujuannya untuk mempererat hubungan agar semakin guyub rukun dan saling membantu satu sama lain. kegiatan sosial di masyarakat Desa Parangtritis antara lain kerja bakti, menengok orang sakit, rawang (membantu dimasyarakat yang hajatan), arisan dan masih banyak lagi.

Kerja bakti di Desa Parangtritis sering kali dilakukan, seperti setiap padukuhan serta RT RW yang ada di desa Parangtritis punya jadwal masing-masing untuk kerja bakti, dan biasanya kerja bakti dilakukan pada hari minggu karena hari minggu banyak masyarakat yang sedang tidak masuk kerja sehingga mudah mengumpulkan masyarakat. dan kerja bakti yang ini di koordinir oleh dukuh lewat ketua RT yang akan menyampaikan ke masyarakatnya. Bukan hanya bapak-bapak saja untuk kerja bakti tetapi ibu-ibu juga ikut serta muda mudinya.

Kegiatan yang sering dilakukan di Desa Parangtritis yaitu arisan, banyak sekali arisan sesuai kalender jawa. Hal ini memang sengaja dilakukan selain untuk keakraban juga untuk membantu ekonomi mereka. Dan mereka untuk konsumsi juga tidak mengharuskan yang mahal dan banyak. Cukup dengan minum teh manis atau pahit dan snack seadanya.

F. Profil Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat

1. Sejarah Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, secara epistimologi, kata kolaborasi berasal dari bahas Inggris yaitu 'co-labour' yang artinya bekerja

bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas 13 organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi .

Pengembangan obyek wisata dilakukan sebagai upaya melestarikan peninggalan terdahulu. Dimana obyek wisata memiliki nilai sejarah tersendiri yang perlu dilestarikan terus menerus. Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam penertiban Pantai Parangtritis ditujukan untuk melestarikan peninggalan orang terdahulu dan pengembangan dilakukan agar wisata ini tidak kalah dengan obyek wisata lainnya.

Struktur jaringan dalam kolaborasi tersebut kuat karena hanya dilakukan oleh pihak dan tanpa adanya pihak swasta. Kedua pihak sama-sama memiliki komitmen yang kuat dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis tersebut . Rasa percaya antara kedua pihak sangat baik dengan adanya pola komunikasi yang transparan sehingga tidak adanya rasa tiak percaya antara pelaku. Kejelasan tata kelola dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis juga jelas dimana pihak yang terlibat memiliki garis koordinasi yang saling berhubungan. Akses terhadap otoritas pada peneriban ini sangat baik karena pihak tertinggi dalam pengembangan memiliki akses yang luas untuk mengetahui pengembangan yang dilakukan serta adanya pembagian tugas yang jelas.

Dalam berbagi informasi sangatlah transparan karena adanya informasi yang bisa diakses semua orang berupa media sosial dan adanya group chat yang digunakan untuk pengelola dalam membagikan informasi yang dijadikan sebagai media bertukar informasi. Dalam pembagian tanggung jawab antara kedua pihak dilakukan dengan baik dengan adanya target yang ditetapkan setiap tahunnya agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Dalam pengembangan ini juga dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia agar kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari penertiban pariwisata pantai parangtritis dapat diketahui bahwa kolaborasi yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat telah dilakukan dengan baik, indikator yang mengukur keberhasilan juga memiliki hasil akhir yang baik, namun dalam meningkatkan pengunjung kedua pihak masih kurang karena adanya penurunan pengunjung beberapa tahun terakhir karena adanya berbagai faktor dari infrastruktur, cuaca serta banyaknya obyek wisata baru.

2. Tahapan-Tahapan Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat

- 1) Tahap I *Problem Setting*. Problem setting adalah upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.
- 2) Tahap II *Direction Setting*. Yaitu menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok. Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

3) Tahap III *Implementation*. Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis

1. Kualitas SDM Pelaku Pariwisata masih rendah, Kualitas Sumber Daya manusia yang relatif masih rendah, etos kerja yang rendah, pola kerja subsistensi dan belum tersentuh oleh program-program pemberdayaan berimplikasi terhadap produktifitas dan kreatifitas dalam berusaha.
2. Eksploitasi SDA yang belum terkendali Eksploitasi SDA yang belum terkendali dengan dalih untuk membuka lapangan pekerjaan menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan hilangnya keindahan alam dan keseimbangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada kolaborasi penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Partisipasi dalam kolaborasi penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul masih kurang terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara semua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.

Tindakan-tindakan kolaborasi dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwistaan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.

Tindakan-tindakan kolaborasi dalam penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborative Governance atau Kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih berperan aktif serta perlu ada regenerasi di pihak POKDARWIS agar lebih aktif lagi berkolaborasi dalam melakukan penertiban untuk mengembangkan pariwisata Parangtritis
2. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus membangun komunikasi yang lebih baik dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata.
3. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan pantai Parangtritis menjadi lebih baik.

4. Harus selalu berbenah melakukan inovasi-inovasi yang sudah ada. Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Pokja Pokdarwis, Jaga Satru, dan SOSDL juga harus rutin melaksanakan evaluasi terkait penertiban pariwisata pantai parangtritis

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. Collaborative governance In Theory And Practive. Journal Of Public Administration. University of California berkeley.
- Ansell, C. dan Alinson, G. 2012. Stewards, Mediator, and Catalyst: Tower A Model Of Collaborative Leadership1, The Inoviation Journal. Vol.17 No.1
- Amanulloh, Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arikunto, S., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanah, H. 2017. *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taqaddum.
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nilamsari, N. 2021. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Wacana.
- Riduwan, (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sedamaryanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan)*. Bandung; Mandar Maju.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saryono, Anggraeni. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 98-99.
- Sugiyono, 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Widjaja, Haw. (2003). *Otonomi Desa*: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. PT. RajaGrafindon Persada.

Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance(studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten selemang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020